

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Partisipasi Anak dalam Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Mojokerto dapat disimpulkan bahwa partisipasi anak dalam penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Mojokerto telah terlaksana dengan cukup baik dan juga bisa menunjukkan bahwa adanya keterlibatan anak dalam berbagai tahapan kebijakan. Pada partisipasi tersebut telah diwujudkan melalui keterlibatan Forum Anak Kota Mojokerto dalam berbagai kegiatan yang telah difasilitasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Berdasarkan analisis menggunakan teori tangga partisipasi anak Roger Hart tingkat partisipasi anak didominasi pada kategori *genuine participation*, khususnya pada tingkat *assigned but informed* (level 4) dan *consulted and informed* (level 5), di mana anak telah memahami tujuan keterlibatannya, memperoleh informasi yang memadai, serta memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi yang dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan. Pada beberapa program ini juga, telah melibatkan penerapan *adult-initiated, shared decisions with children* (level 6) yang mana telah menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan anak dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, partisipasi ini belum sepenuhnya mencapai tingkat tertinggi karena sebagian besar inisiatif program berasal dari pemerintah, sehingga ruang bagi anak untuk menginisiasi kebijakan secara mandiri masih terbatas.

Pada pelaksanaan partisipasi anak dalam kebijakan Kota Layak Anak di Kota Mojokerto dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Adapun faktor pendukung meliputi adanya peraturan daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak sebagai landasan hukum, komitmen Dinsos P3A sebagai *leading sector*, keberadaan Forum Anak Kota Mojokerto yang sebagai wadah resmi partisipasi anak, juga serta berbagai program yang telah memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi. Adapun faktor penghambatnya meliputi proses pengambilan keputusan yang mana masih cenderung bersifat *top-down*, belum meratanya kapasitas dan kepercayaan diri anggota forum anak dalam menyampaikan pendapat, serta juga belum

optimalnya mekanisme tindak lanjut dan umpan balik pemerintah terhadap usulan yang disampaikan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ruang partisipasi meningkatkan kapasitas forum anak, serta juga optimalisasi mekanisme tindak lanjut terhadap aspirasi anak agar partisipasi anak tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi berkembang menjadi kemitraan yang lebih setara dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, implementasi Kota Layak Anak di Kota Mojokerto tidak hanya mampu memenuhi indikator administratif, akan tetapi juga mewujudkan pemenuhan hak anak yang partisipasi, inklusif, dan juga keberlanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Mojokerto diharapkan dapat memperkuat mekanisme partisipasi anak dengan cara memberikan ruang yang lebih luas kepada forum anak Kota Mojokerto dalam proses perencanaan pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan. Selain itu juga perlu adanya peningkatan penyampaian umpan balik secara terbuka terhadap setiap aspirasi yang telah disampaikan oleh anak agar mereka mengetahui tindak lanjut dari usulan yang telah diberikan.
2. Bagi forum anak Kota Mojokerto, diharapkan terus meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pelatihan diskusi maupun kegiatan pengembangan kepemimpinan sehingga mampu menyampaikan aspirasi secara lebih kritis, aktif, dan representatif terhadap kebutuhan anak di Kota Mojokerto.
3. Bagi pemerintah Kota Mojokerto diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan sekolah, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar partisipasi anak tidak hanya melibatkan anggota forum anak saja tetapi juga menjangkau lebih banyak anak dari berbagai latar belakang sehingga pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) menjadi lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, P. H. A. K. (2025). *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*. 9(1), 66–77.
- Anwar, A. (2024). *Upaya Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Kabupaten Bandung Dalam Pelaksanaan “ Program Kabupaten Bandung Layak Anak .”* 23(1).
- Arindi, A. P., & Hidayat, E. (2024). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya*. 4, 10267– 10278.
- Children, P. O. F., Criminal, F., In, A., & Child-friendly-city, I. O. F. A. (2020). *Protection of children from criminal action in the implementation of a child- friendly-city*. 25(2), 135–141.
- Darmawan, A. D. (2022). *Elemen kunci pendorong partisipasi masyarakat sebagai fondasi kebijakan Smart City : Suatu kajian pustaka sistematis Critical elements in enhancing community participation as foundation of the Smart City policies : A systematic literature review*. 17(1), 105–124. <https://doi.org/10.14203/jki.v17i1.714>
- Dinas, P., Perempuan, P., Kota, A., Kota, M., Anak, L., & Rahayu, S. D. (2024).
- Dwitasari, K. A. (2024). *Mengkaji Perkembangan Partisipasi Warga Negara Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. 2.
- Fadila, F., & Khaddafi, M. (2025). *PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF : WAWANCARA DATA COLLECTION IN QUALITATIVE RESEARCH : INTERVIEWS*. 13446–13449.
- Fitri, S. N. (2025). *Evaluation of Legal Protection for Women and Children ' s Victims of Violence by the Bengkulu City Office of Women ' s Empowerment and Child Protection*. 6(1), 56–65. <https://doi.org/10.18196/jphk.v6i1.24339>
- Hale, W. (2016). *Turkey ' s domestic politics , public opinion and Middle East policy*. Palgrave Communications, 2. <https://doi.org/10.1057/palcomms.2016.81>
- Lundy, L., Orr, K., & Marshall, C. (2020). *Children ' s rights budgeting and social accountability : Children ' s views on its purposes , processes and their*. 91–113.
- Muhaimin, H., Utama, J. Y., Afandi, A. H., & Alifa, N. (n.d.). *Dinamika Korupsi Dalam Sistem Birokrasi : Strategi Solutif dan Implementasi Kebijakan Efektif Dynamics of Corruption in Bureaucratic Systems : Solution Strategies and Effective Policy Implementation*. 58–65.
- Nelly, S. (2024). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico*. 6, 86–94.
- Pratiwi, D. C., Kriswibowo, A., Studi, P., & Publik, A. (2022). *PEMBERDAYAAN*

*PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN / KOTA LAYAK
ANAK. 7, 192–204.*

- Roza, D. (2018). *Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia*. 25(1), 198–215.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>
- Surakarta, D. I., & Makassar, D. A. N. (2015). *WORTH THE EFFORT TO ACHIEVE THE CITY OF CHILDREN*. 149–160.
- Syahfiradella, A. D., Budhiartie, A., & Syam, F. (2025). *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Dalam Proses Hukum Dan Kebijakan Publik*. 9, 13270–13279.
- Hidayat, E. W. (n.d.). *TRANSFORMASI DIGITAL PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES*. 23(August 2024).
- Indonesia, I. H. A. (2015). *Djoko Purwanto,SH,.Mhum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember)*. November 1989.
- Jehudat, V. K., Novaria, R., & Soesiantoro, A. (2024). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA SURABAYA*. 1(3), 451–461.
- Journal, M. (n.d.). *DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK*. 2(3), 1–13.
- Judijanto, L., Hotman, F., Damanik, S., Kusnadi, I. H., Leuwol, N. V., Jakarta, I., Pgri, U., Barat, S., Subang, U., Respati, U., & Sorong, U. V. (n.d.). *ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK : MENILAI EFEKTIVITAS MODEL membangun fondasi demokratis dan menjembatani hubungan antara pemerintah dan warganya . Penelitian ini , berjudul " Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik : aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas model keterlibatan warga dalam konteks pengambilan keputusan publik , terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang efektivitas model tentang cara terbaik untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik . konteks pengambilan keputusan publik , tetapi sebagian besar fokus pada deskripsi tingkat.*
- Kirana, D. A. (2024). *Partisipasi Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia : Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik*. 2(3), 285–299.
- Layak, K., Dalam, A., & Otonomi, S. (2024). *IMPROVING CHILDREN ' S QUALITY OF LIFE THROUGH CHILD-*. 2(1), 81–91.
- Luang, W., Kegiatan, D. A. N., Di, B., & Serang, K. (2024). 3 1,2,3. 09.
- Management, J., Review, E., Pattimura, U., & Raya, P. (2025). *Public Participation and Policy Implementation : Evaluating the Effectiveness of Community Involvement in Local Development Programs*. 601–618.

- Manganti, G. S. (2023). *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik*. 3(11), 380–389.
- Media, I., & Media, I. (2024). *GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*. 11, 247–257.
- Number, A. (2018). *Jurnal Bina Praja Acceleration Model of Child-Friendly City / District*. 735, 147–157. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.147-157>
- Nurakhmadi, D. A., & Rahmawan, T. I. (2024). *Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran : Strategi dan Rekomendasi Kebijakan*. Penanggulangan, D., Jalan, A., & Kota, D. I. (2025). 1, 2 1. 36, 317–325.
- Pholpark, A., & Srithamrongsawat, S. (2026). *Exploring the Burden of Family Caregivers for Dependent Older Persons under Community-Based Long-Term Care in Nakhon Pathom , Thailand*. 249–264.
- Pratiwi, D. C., Kriswibowo, A., Studi, P., & Publik, A. (2022). *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN / KOTA LAYAK ANAK*. 7, 192–204.
- Rachmanto, E. F. (2021). *LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS*. 2, 515–526.
- Sleman, K., Yogyakarta, D. I., & Dianto, M. E. (2015). *No Title*.
- Studi, P., Publik, A., Widya, U., Gamping, K., Sleman, K., Istimewa, D., Brontokusuman, K., & Village, M. (2026). *Kampung Ramah Anak ; Upaya Penerapan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Di Kampung Karanganyar Kelurahan Brontokusuman Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta*. 14(1), 17–40. <https://doi.org/10.37631/populika.v14i1.2178>
- Susiawati, T., & Mashur, D. (2025). *Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru*. 1, 1–13.
- Swadesi, U., Rusli, Z., Studi, P., & Ilmu, M. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK*. 16, 77–83.
- Syahfiradella, A. D., Budhiartie, A., & Syam, F. (2025). *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Dalam Proses Hukum Dan Kebijakan Publik*. 9, 13270– 13279.
- Tandhim, A. W. A. (2025). *Efektivitas Collaborative Governance untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang*. 4, 391–404.
- Taufiq, D. A., & Si, M. (n.d.). *No Title*.
- Thalib, M. A. (2022). *Madani : Jurnal Pengabdian Ilmiah Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya*. 5(1), 23–33.
- Waruwu, M. (2024). *Pendekatan Penelitian Kualitatif : Konsep , Prosedur , Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan*. 5, 198–211.
- Zulkarnaini, R. K. (2025). *Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah*

Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Administrasi Publik.
08(12), 1–5.